

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENETAPAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latas Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.5.1 Perlindungan Hukum	9
1.5.2 Pemegang Saham	10

1.5.3	Jua Beli Saham.....	12
1.5.4	Daftar Perseroan.....	14
1.6	Metode Penelitian.....	16
1.6.1	Tipe Penelitian	16
1.6.2	Pendekatan Masalah.....	17
1.6.3	Sumber Bahan Hukum	18
1.6.4	Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	19
1.7	Sistematika Penulisan.....	19
BAB II AKIBAT HUKUM BAGI PENJUAL SAHAM YANG NAMANYA MASIH TERCANTUM DALAM DAFTAR PERSEROAN		21
2.1	Kewajiban Perseroan Terbatas Mencatat Perubahan Susunan	
	Pemegang Saham	22
2.2	Tanggung Jawab Pemegang Saham sepanjang Namanya tetap	
	Tercantum dalam Daftar Perseroan	27
2.2.1	Gugatan Terhadap Pemegang Saham dari dalam Perseroan.....	33
2.2.2	Gugatan Terhadap Pemegang Saham dari luar Perseroan	35
BAB III UPAYA HUKUM BAGI PENJUAL SAHAM UNTUK MENGHAPUS NAMANYA DARI DAFTAR PERSEROAN		38
3.1	Prosedur Pencatatan Perubahan Daftar Pemegang Saham dalam Data Perseroan dan Daftar Perseroan	42

3.2 Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum terhadap Perseroan..... 55

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 63

4.2 Saran..... 63

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, LN RI Tahun 1995 Nomor 13, TLN RI Nomor 3420 ;
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, LN RI Tahun 1995 Nomor 64, TLN RI Nomor 3608;
- Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN RI Tahun 2007 Nomor 106, TLN RI Nomor 4756;
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN RI Tahun 2007 Nomor 56, TLN RI Nomor 4746;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 M.HH-03.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Daftar Perseroan;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas;
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbedaan Daftar Pemegang Saham, Data Perseroan, dan Daftar Perseroan
.....45

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Alur Perubahan Daftar Pemegang Saham dalam Data Perseroan dan
Daftar Perseroan51